



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERAPDU SATU PINTU TAHUN 2026





MAL PELAYANAN PUBLIK

RENJA 2026



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BATAM**

🌐 dpmptsp.batam.go.id

📱 [dpmptspbatam](#)

✉ dpmptsp@batam.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam TA. 2026 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam Tahun 2026 disusun mengacu dan konsisten dengan prioritas, tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah sebagaimana dalam rancangan Renstra DPMPTSP Kota Batam periode 2025-2029. Tatkala penting yang menjadi fokus penyusunannya agar selaras dengan tugas fungsi Dinas serta program prioritas Kepala Daerah terhadap pembangunan daerah Kota Batam.

Dalam dokumen perencanaan, Renja PD merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun pelaksanaannya demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Batam, September 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BATAM



Reza Khadafy.S.STP.,MPA.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 19800619 199912 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
I.1 Latar Belakang	5
I.1.1 Pengertian Renja PD	5
I.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	6
I.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	6
I.2 Landasan Hukum	6
I.3 Maksud dan Tujuan	7
I.3.1.Maksud Penyusunan Renja PD	7
I.3.2.Tujuan Penyusunan Renja PD	8
I.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	9
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.3.1Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	24
2.3.2Permasalahan dan Hambatan	24
2.3.3Peluang dan Tantangan	24
2.3.4Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III	40
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	41
BAB IV	54
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB V. PENUTUP.....	62
5.1 Catatan Penting	62
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	63
5.3 Rencana Tindak Lanjut	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	23
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Kota Batam	28
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.....	41
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	45
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja.....	5
Gambar I.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen lainnya.	6

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.1.1 Pengertian Renja PD

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam kurun waktu 5 (lima) sebagaimana tertuang di dokumen perencanaan Rencana Strategis. Renja DPMPTSP Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja disusun sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dan Pasal 5 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, berpedoman dengan Renstra PD dan RKPD sesuai dengan tugas fungsi DPMPTSP Kota Batam berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

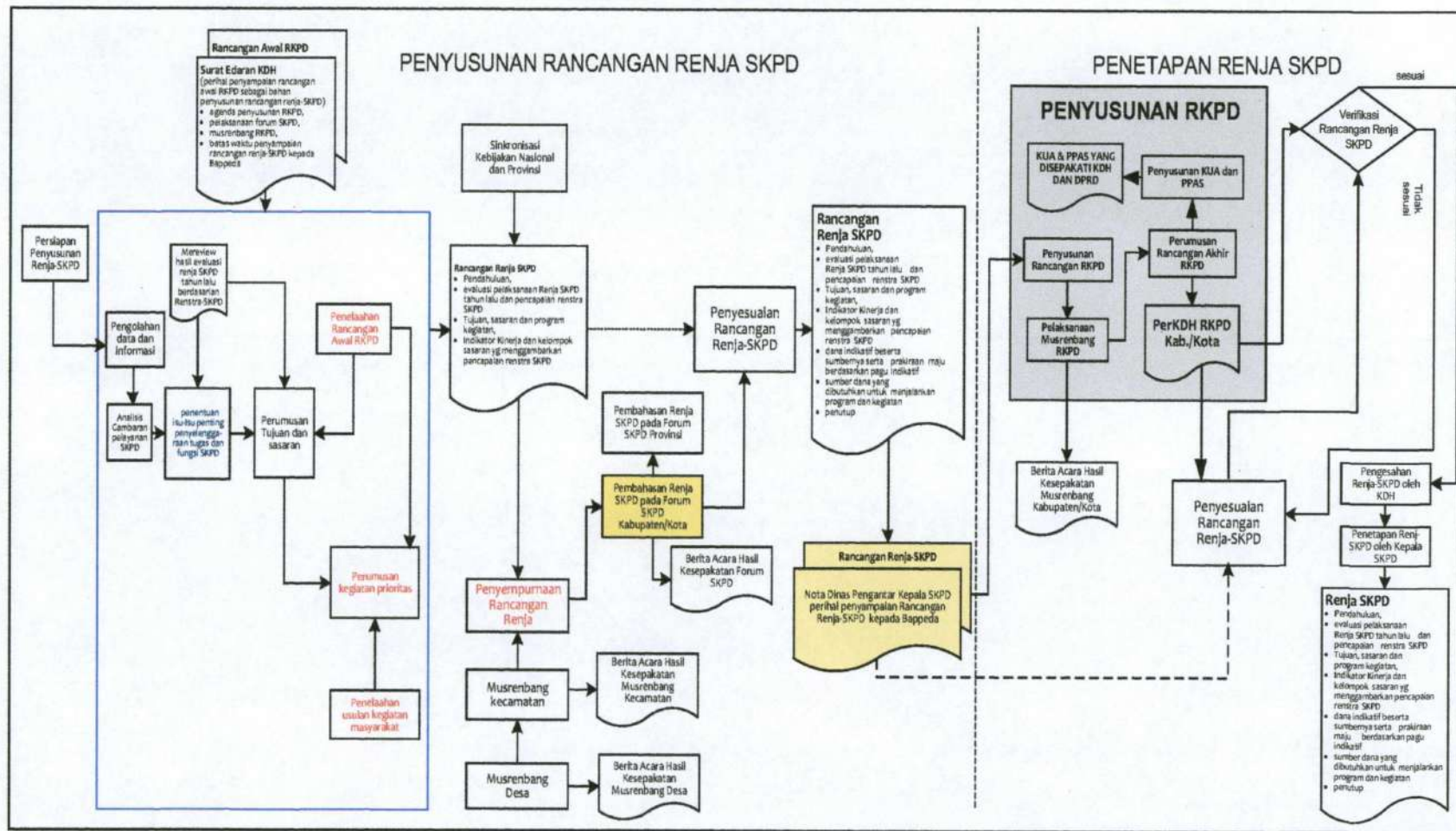
I.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

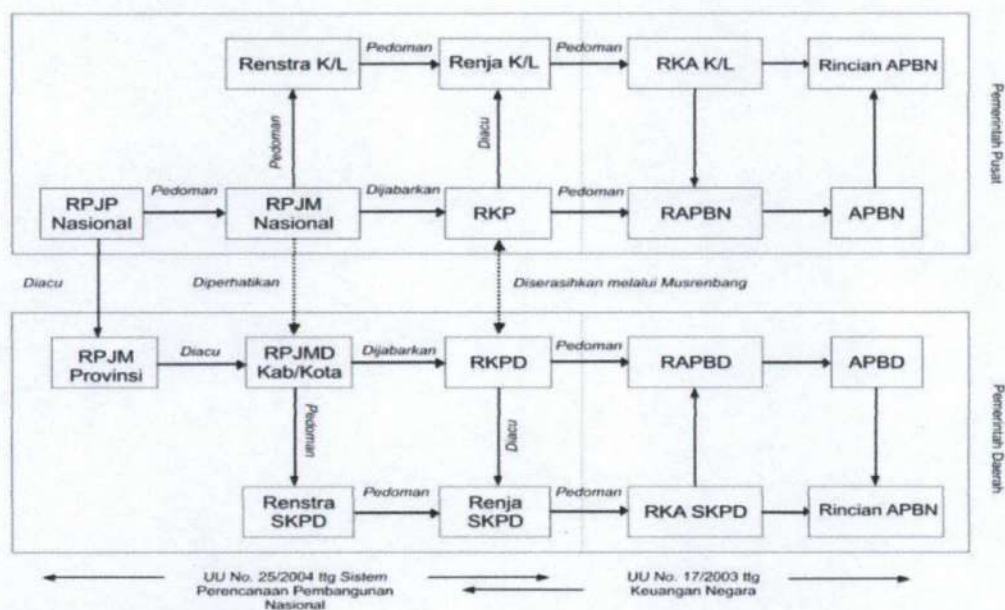
Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



I.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Batam Periode 2025 - 2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Propinsi Kepulauan Riau/ Pada lingkup pemerintahan, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Gambar I.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen lainnya



I.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam;
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 15 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja PD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, dan memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Mengurai latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelegaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1), tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Kota Batam Tahun 2026 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Di tahun 2025 Perubahan Renja DPMPTSP Kota Batam melaksanakan 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan.

Di Tahun 2025 DPMPTSP Kota Batam menyusun anggaran untuk mencapai 2 (dua) sasaran organisasi yakni, Sasaran 1) Meningkatnya realisasi investasi, dengan target indikator kinerja **Jumlah Realisasi Investasi** dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan, dengan target indikator kinerja **Persentase Penurunan Pengaduan Layanan oleh Masyarakat**.

Selanjutnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 DPMPTSP Kota Batam dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan *outcome* kinerja yakni: Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (2 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 2 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan *outcome* kinerja yakni: Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi (100%);
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan *outcome* kinerja kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum PD dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (6 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 6 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan *outcome* kegiatan

yakni: Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (1 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 1 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan memiliki *outcome* yaitu: Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan *outcome* kinerja yakni: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan *outcome* kegiatan ini yakni: Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang Dipenuhi dengan target kinerja (45%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah dokumen yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang seharusnya disusun);

III. Program Promosi Penanaman Modal dengan melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, *outcome* kegiatan ini yakni: Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan dengan target kinerja (90%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan).

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, *outcome* kegiatan ini yakni: Tingkat Ketepatan Waktu Responsif Berjalannya Proses Perizinan, Konsultasi, dan Pengaduan dengan target kinerja (90%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah izin terbit sesuai SOP dibagi jumlah seluruh izin terbit).

V. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, *outcome* kegiatan ini yakni: Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM dengan target kinerja (10%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan
Sebagaimana dalam penjelasan yang telah diuraikan di atas, secara rinci, dan sekaligus merupakan gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Tahun 2025	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		NA	NA		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2	1801		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kegiatan urusan yang terpenuhi	Indek Pelayanan Kesekretariatan PD	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25.00	
2	1801	201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Monitoring Anggaran yang Dilaksanakan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
2	1801	20101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0

2	1	0	2	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	4 Laporan	0 Laporan	0
2	1	0	2	0		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	85.24%	100%	25%	25.00
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 OB	532 OB	840 OB	641 OB	70.48%	826 OB	162 OB	19.61
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	12 Dokumen	3 Dokumen	25.00
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324 Dokumen	276 Dokumen	94 Dokumen	55 Dokumen	58.51%	0 Dokumen	0 Dokumen	0
2	1	0	2	0	5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	0	100%	100%	100%	100 %	0%	0
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	0	0 Paket	0 Paket	0%	60 Paket	0 Paket	0
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 ASN	0	1 ASN	1 ASN	100%	4 ASN	0 ASN	0
2	1	0	2	0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	90%	90%	100%	100%	91.70%	90%	22.50%	22.50

2	1 8	0 1	2	0 6	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	0 Paket	0
2	1 8	0 1	2	0 6	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Paket	32 Paket	32 Paket	32 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	25.00
2	1 8	0 1	2	0 6	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	660 Paket	660 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	3 Paket	1 Paket	33.33
2	1 8	0 1	2	0 6	0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang didisediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	2 Paket	0 Paket	0
2	1 8	0 1	2	0 6	0 6	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	3 Dokumen	25.00
2	1 8	0 1	2	0 6	0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	94 Laporan	94 Laporan	55 Laporan	58.51%	94 Laporan	7 Laporan	7.44
2	1 8	0 1	2	0 7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0
2	1 8	0 1	2	0 7	0 5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	0 Unit	0
2	1 8	0 1	2	0 7	0 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	35 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	33 Unit	0 Unit	0

2	1 8	0 1	2	0 7	1 1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0
2	1 8	0 1	2	0 8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	100%	100%	100%	81.49%	100%	25%	25.00
2	1 8	0 1	2	0 8	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50.00
2	1 8	0 1	2	0 8	0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25.00
2	1 8	0 1	2	0 8	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	416 Laporan	416 Laporan	416 Laporan	230 Laporan	44.47%	416 Laporan	6 Laporan	1.44
2	1 8	0 1	2	0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	210%	100%	25%	25.00
2	1 8	0 1	2	0 9	0 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%

2	1 8	0 1	2	0 9	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	5 Unit	83.33
2	1 8	0 1	2	0 9	0 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Unit	13 Unit	13 Unit	56 Unit	430.77%	97 Unit	25 Unit	25.77
2	1 8	0 1	2	0 9	0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0 Unit	0
2	1 8	0 2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Tingkat Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	Realisasi Total terhadap Target Investasi	5%	0	5%	636.55%	127.31%	5%	0%	0
2	1 8	0 2	2	0 1		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh insentif	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	8%	0	8%	0%	0%	0%	0%	0
2	1 8	0 2	2	0 1	0 2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0
2	1 8	0 2	2	0 2		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	Persentase investor yang memanfaatkan peta potensi dan peluang usaha	65%	5%	100%	100%	100%	5%	65%	65.00
2	1 8	0 2	2	0 2	0 4	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi investasi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	65.00

2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Persentase tingkat minat investasi	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	95%	95%	95%	47.5%	47.5%	95%	0%	0
2	18	03	2	01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Jumlah Pengunjung Pameran Penanaman Modal, Rata-rata pengunjung media informasi promosi investasi	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	64%	64%	64%	0%	0%	95%	0%	0
2	18	03	2	01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategis Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	10 Dokumen	0 Dokumen	0.00
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	95%	95%	90%	92.89%	101.8%	95%	40%	40.00
2	18	04	2	01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Ketepatan waktu responsif berjalannya proses perizinan konsultasi dan pengaduan	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai waktu SOP	90%	90%	90%	92.89%	103.33%	97%	40%	40.00
2	18	04	2	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0

2	1 8	0 4	2	0 1	0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	0 Dokumen	15819 Pelaku Usaha	308.96%	5000 Pelaku Usaha	2361 Pelaku Usaha	47.22
2	1 8	0 4	2	0 1	0 7	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	1235 Pelaku Usaha	472.92%	240 Pelaku Usaha	33 Pelaku Usaha	13.75
2	1 8	0 4	2	0 1	0 8	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100%	120 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	3.33
2	1 8	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		10%	10%	10%	139.94%	1399%	10%	100%	100.00

2	1 8	0 5	2	0 1		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Daerah	Jumlah data investasi yang dikelola	Tingkat pelaporan LKPM	10%	10 %	10%	99.64%	996.40%	10%	0%	0
2	1 8	0 5	2	0 1	0 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0%	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0
2	1 8	0 5	2	0 1	0 5	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	824 Pelaku Usaha	412%	380 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0
2	1 8	0 5	2	0 1	0 6	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yangng Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	36 Kegiatan Usaha	292%	120 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0

2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	80%	80%	80%	108%	125%	80%	0%	0
2	1	0	2	0	1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; Evaluasi pengembangan sistim informasi yang dilaksanakan	Persentase data dan informasi yang terintegrasi	80%	80%	80%	108%	100%	80%	0%	0
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Dokumen	3000 Dokumen	3000 Dokumen	3238 Dokumen	107.93%	3000 Dokumen	0 Dokumen	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pada bagian ini diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

Indikator Kinerja Utama

I. Kenaikan Realisasi Investasi

Perbandingan target dan realisasi tahun 2024 dan 2025 per semester I

Target realisasi investasi di tahun 2024 sebesar Rp4.000.000.000.000 pada Penetapan Kinerja Perubahan Dinas sebesar dengan capaian realisasi investasi sebesar Rp25.462.030.732.730, dan Tahun 2025 sampai dengan semester I capaian realisasi investasi sebesar Rp8.616.828 yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar Rp2.715.163 dan PMA sebesar Rp5.901.665. Jika dibandingkan capaian realisasi investasi antara tahun 2024 dan 2025 di semester I terlihat pertumbuhan realisasi investasi sebesar Rp1.685.022 atau sebesar 24.31%, angka ini dibandingkan dengan angka realisasi investasi tahun 2024 di semester I PMDN sebesar Rp2.421.702 dan PMA sebesar Rp4.510.104 total realisasi investasi sebesar Rp6.931.806. maka ada kenaikan capaian, akan tetapi pencapain realisasi investasi di Renja tahun 2025 tetap melebihi target. Peningkatan realisasi investasi yang sangat besar dan signifikan ini dikarenakan adanya penghitungan realisasi investasi tidak hanya menghitung realisasi investasi PMDN saja, namun juga menghitung realisasi investasi PMA yang merupakan bagian dari keseluruhan investasi di daerah. Cara penghitungan realisasi investasi ini dilakukan untuk mengetahui keseluruhan realisasi investasi yang ada di daerah dan dapat dipakai sebagai tolok ukur kemajuan maupun kemunduran perekonomian daerah dan meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja serta berkurangnya jumlah angka pengangguran di daerah.

- II. Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara regular

Realisasi capaian pada tahun 2024 sebesar 24.41%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 10%. Peningkatan realisasi capaian ini dikarenakan fungsi pembinaan dan pengawasan di DPMPTSP Kota Batam telah berjalan dengan sangat optimal.

- III. Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan

Target yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebesar 5%, dimana diharapkan adanya penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat sebanyak 5%. Realisasi yang dicapai adalah 100%, yang artinya pengaduan layanan oleh masyarakat di DPMPTSP Kota Batam telah 100% memenuhi target.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan

Indikator Kinerja Utama

- I. Persentase Jenis Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Online

Target persentase perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai waktu SOP di tahun 2024 sebanyak 90% dengan capaian realisasi sebanyak 88%. Namun untuk jumlah perizinan yang diterbitkan melampaui target, dimana untuk jumlah perizinan bidang ekonomi dan sosial yang diterbitkan mencapai 40375 izin dengan target 40000 izin dan jumlah perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang diterbitkan mencapai 4023 izin dengan target 5000 izin.

- II. Indeks Kepuasan Masyarakat

Target yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah IKM A dan realisasi yang dicapai adalah IKM A dengan nilai 89.43%. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit Pelayanan berada dalam mutu kategori Sangat Baik.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Realisasi Investasi			Rp3 T	Rp3 T	Rp16.61 T	Rp19.10 T	Rp 15.620.970.368.755	Rp. 25.462.030.732.730	Rp16.61 T	Rp19.10 T	
2	Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara Reguler			10%	10%	10%	10%	55%	79,18%	10%	10%	
3	Menurunnya Persentase Aduan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan			5%	5%	5%	5%	100%	100%	5%	5%	
4	Persentase Jenis Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Online			90%	90%	90%	90%	90%	90 %	90%	90%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat			A	A	A	A	A	A	A	A	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2024 yang masuk kategori “Sangat Berhasil” yakni realisasi capaian melebihi target yang ditetapkan adalah:

- a. Indikator Kinerja Realisasi Investasi, di tahun 2024 mencapai Rp.15.620.970.368.755.
- b. Indikator Kinerja Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan, di tahun 2024 mencapai 44398 Izin meliputi perizinan melalui aplikasi EASY, OSS, dan SIMBG (non berusaha yang belum ada di OSS).

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2024 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat beberapa masalah umum dan permasalahan yang tidak terprediksi yaitu:

- a. Sulit menghubungi dan bertemu penanggungjawab usaha/pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- b. Ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena kekurangan personil back office untuk penelitian teknis berkas permohonan izin yang masuk;
- c. Keterlambatan pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi bagi jenis perizinan yang dikenai retribusi, yang berakumulasi dengan rentang waktu penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP;
- d. Dalam proses pengaktifan izin dengan komitmen masih ada yang dilakukan secara manual dan membutuhkan jenjang alur yang panjang;
- e. Adanya ketidaksesuaian data *scan* yang diinput oleh pemohon, sehingga memperlambat proses verifikasi berkas;
- f. Pelimpahan izin belum dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi dan belum dilakukan penyesuaian tupoksi DPMPTSP Kota Batam;
- g. Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan belum menggambarkan tanggal masuk dan tanggal selesai perlu waktu yang lebih lama untuk melakukan pengecekan jumlah izin terbit tepat waktu.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesejangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu pada umumnya timbul dari kekuatan

yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu akan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di tahun sebelumnya, agar dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Faktor internal tersebut dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan berupa kelemahan (*weaknesses*).

1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis ini merupakan faktor pendukung dan pemacu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja PD, dan faktor kekuatan yang dimiliki DPMPTSP Kota Batam adalah:

- a. Letak geografis yang strategis;
- b. Bangunan gedung yang cukup memadai;
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal;
- e. Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penanaman modal dan PTSP.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Disiplin dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih rendah;
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan sub urusan PTSP;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

II. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Faktor eksternal yang menjadi peluang (*Opportunities*) adalah sebagai berikut:

1. Peluang (Opportunities)

Isu strategis ini merupakan isu strategis yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Beberapa isu strategis yang menjadi faktor peluang (*opportunities*) DPMPTSP Kota Batam adalah :

- a. Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara professional;
- b. Penerapan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi OSS RBA (*Risk Based Approach*);
- c. Minat pelaku usaha dalam berinvestasi di Kota Batam semakin tinggi;
- d. Iklim investasi di daerah yang kondusif;
- e. Merupakan daerah industri yang memiliki zona KEK dalam rangka memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi investor yang menanam modalnya di zona KEK;
- f. Pertumbuhan UMKM di Kota Batam yang mampu menyerap tenaga kerja;
- g. Penyediaan data potensi dan peluang investasi yang merupakan modal pelaksanaan promosi secara optimal dan tepat sasaran;
- h. Tersedianya tempat dan *event* pameran skala nasional dalam rangka promosi peluang investasi Kota Batam.

2. Ancaman (Threats)

Isu strategis faktor eksternal yang menjadi Ancaman (*threats*) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD yang merupakan kendala maupun penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi yang terus mengalami perubahan yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan;
- b. Rendahnya antusias masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan usahanya;

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam antara lain :

Permasalahan secara umum investasi di Kota Batam yaitu kurangnya akses promosi penanaman modal, tetapi secara umum Investasi di Kota Batam mengalami peningkatan yang sangat

signifikan dikarenakan banyak faktor pendukung dari Pemerintah Pusat baik dari sisi kebijakan maupun anggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada table di bawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Kota Batam

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				19.284.512.595	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				18.584.200.721	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	17.467.572.055	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP	90,32 Nilai 73,54 Nilai	17.537.296.521	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyusunan, Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu	100%	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	8.356.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.542.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	20 Laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.813.600	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100 %	13.636.132.909	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	13.924.616.557	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang	13.506.022.909	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	13.885.736.557	Bertambah Jumlah ASN Sebanyak 15 Orang Pada Tahap Pengangkatan P3K TA. 2025
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	38.880.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	38.880.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324 Kegiatan	91.230.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Kegiatan	0	Tahun 2025 Subkegiatan masuk kedalam kegiatan keuangan perangkat daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	100%	184.346.646	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	88.494.000	

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45 Stel	35.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69 Stel	0	Bertambahnya Jumlah ASN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 ASN	148.596.646	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	88.494.000	Diklat JF Sesuai Jenjang yang Tersedia
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase penyediaan administrasi umum PD	100%	702.789.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	665.195.500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	3.150.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.205.000	Penambahan Bola Lampu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Paket	142.323.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	142.301.500	Penambahan Kebutuhan Box Arsip
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	660 Paket	84.084.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	37.472.500	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	32.750.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.885.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.970.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	438.682.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	445.361.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	536.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	590.529.500	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	341.568.000	
	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	36.000.0000	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	21.525.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	500.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	227.436.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	1.694.992.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	1.717.679.964	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	24 Laporan	432.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0 Laporan	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	1.544.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	1.497.940.800	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 Laporan	94.502.400	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	125.236.764	Gaji THL 3 orang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	713.311.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	542.425.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.280.000	Kendaraan dinas Kepala
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	243.790.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	179.950.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Unit	252.845.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	130.925.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	216.676.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	193.270.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Batam	Realisasi Total terhadap Target Investasi	5%	163.015.708	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Batam	Jumlah Realisasi PMDN dan PMA	Rp. 28.071.888.882.835	79.173.000	Peningkatan Investasi (Program Prioritas)
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh insentif	8%	35.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	50 Persen	7.447.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	35.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	7.447.000	Perubahan SSH
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	5%	128.015.708	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Investor yang Memanfaatkan Peta Potensi dan Peluang Usaha	75 Persen	71.726.000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Peta Potensi investasi yang disusun	1 Dokumen	0	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71.726.000	Kewenangan Kabupaten/Kota

	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Batam	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	1 Daerah	128.015.708	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Batam	Jumlah Daerah yang Telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	1 Daerah	0	Kewenangan Provinsi
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	95%	1.061.120.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	1 Persen	700.968.300	Peningkatan Investasi (Program Prioritas)
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan	78%	1.061.120.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100 Persen	700.968.300	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	850.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	564.864.300	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	211.120.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	136.104.000	Konsep (Seluruh OPD yang Berpotensi Untuk Melakukan Promosi) Bagaimana Mereka Melakukan Kerjasama dan Promosi

											((Tidak Secara Teknis)) / Fokus ke Penyusunan Roadmap
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	99%	324.231.829	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80 Persen	144.537.900	Peningkatan Investasi (Program Prioritas)
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Tingkat ketepatan waktu responsif berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan	95%	324.231.829	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Waktu SOP	97 Persen	144.537.900	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Batam	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.950.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Batam	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.950.000	

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000 pelaku usaha	24.776.229	Penyediaan orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku usaha	27.539.700	
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	240 Pelaku Usaha	200.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Batam	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	240 Pelaku Usaha	101.048.200	
Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	120 Kegiatan Usaha	94.505.600	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	11.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	10%	168.813.023	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Proyek Investasi yang Diawasi	5 Persen	39.300.000	Peningkatan Investasi (Program Prioritas)

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	10%	168.813.023	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Tingkat Pelaporan LKPM	20 Persen	39.300.000	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Batam	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	200 Pelaku Usaha	100.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	35.700.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	68.813.023	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	3.600.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	90%	99.759.980	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah	100 Persen	82.925.000	Peningkatan Investasi (Program Prioritas)
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan	90%	99.759.980	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Data dan Informasi yang Terintegrasi	100 Persen	82.925.000	

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka Panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045 menggariskan Visi Indonesia tahun pertama yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang pelaksanaannya pertama tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun pertama berada pada tahap jangka menengah yang ke satu yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2025 Dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu juga menyelaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam tahun peralihan antara RPJMD Kota Batam periode 2025-2029, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam berperan aktif agar pembangunan daerah Kota Batam dapat mencapai target tujuan RPJMD Kota Batam dan lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Batam.

Dalam kesempatan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mendukung Visi Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni “Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata ” yang dijabarkan kedalam 5 (lima) misi (dokumen rpjmd terbaru) dimana DPMPTSP Kota Batam melaksanakan 2 misi yaitu misi 1 (kesatu) yaitu “Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuh kembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global” dan misi 4 (keempat) “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang *good governance*”.

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam disusun mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Batam dan kebijakan nasional yaitu program skala prioritas nasional. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja diarahkan untuk Meningkatnya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan;
- 2. Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu Meningkatkan Realisasi Investasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan dan investasi, maka keluaran yang (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah tingkat investasi dan kualitas pelayanan public sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu “Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Batam Ditingkat Nasional dan Regional”.

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Batam

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026
1	Tujuan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Batam Ditingkat Nasional dan Regional	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	5%
2	Sasaran Meningkatnya Investasi Dalam Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Capaian Realisasi Investasi	100%
3	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.50%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029 yang dirincikan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2025-2029 Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi misi 1 (kesatu) yaitu “Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkan kembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global” dan misi 4 (keempat) “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang *good governance*” Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mengusulkan 6 program, 13 kegiatan dan 32 subkegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 19.284.512.595. Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - 1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko.
 - 4) Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Informasi.
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				18.584.200.721				
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP	Batam	90,32 Nilai 73,54 Nilai	17.537.296.521			90.35	18.458.382.947
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	Batam	100 %	8.356.000			100%	10.400.000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	2 Dokumen	3.542.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	5.200.000
2	18	01	2.02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	4.813.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	5.200.000

2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100%	13.924.616.557			100%	13.733.478.636
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		70 Orang/bulan	13.885.736.557	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		73 Orang/bulan	13.690.617.636
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	38.880.000	PAJAK DAERAH		12 Dokumen	42.861.000
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	0
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100 Persen	88.494.000			100 Persen	163.456.311
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 Orang	88.494.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Orang	163.456.311
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 Persen	665.195.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	695.490.000
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		1 Paket	7.205.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	7.465.000

						Bangunan Kantor yang Disediakan							
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		4 Paket	142.301.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	180.000.000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	37.472.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	30.000.000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2 Paket	30.885.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	36.025.000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	1.970.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	2.000.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	445.361.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	440.000.000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 Persen	590.529.500			100 Persen	1.128.568.000
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	341.568.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	341.568.000

2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		2 Unit	21.525.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	39.000.000
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		8 Unit	227.436.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	500.000.000
2	18	01	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0			11	248.000.000
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 Persen	1.717.679.964			100 Persen	1.655.000.000
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat		24 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	1.497.940.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1.550.000.000
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		24 Laporan	94.502.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	105.000.000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 Laporan	125.236.764	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0

2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 Persen	542.425.000			100 Persen	1.071.990.000
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	38.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	41.080.000
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	179.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	240.910.000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		72 Unit	130.925.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		96 Unit	230.000.000
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	193.270.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	560.000.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMDN dan PMA		Rp.28.071.888.882.835	79.173.000			522.000.000	29.475.483.326.977
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti		50 Persen	7.447.000			50 Persen	12.000.000
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	7.447.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	0

2	18	02	2.01	03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKMD daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	12.000.000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang Memanfaatkan Peta Potensi dan Peluang Usaha	75 Persen	71.726.000		75 Persen	510.000.000
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	300.000.000
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71.726.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	210.000.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	1 Persen	700.968.300		2 Persen	980.000.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100 Persen	700.968.300		100 Persen	980.000.000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	564.864.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	600.000.000

2	18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	136.104.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	380.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80 Persen	144.537.900		80 Persen	357.203.851
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Waktu SOP	97 Persen	144.537.900		97%	357.203.851
2	18	04	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	4.950.000
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	27.539.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5000 Pelaku Usaha	27.253.851

2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		240 Pelaku usaha	101.048.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		260 Pelaku usaha	220.000.000
2	18	04	2.01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		40 Kegiatan Usaha	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Kegiatan Usaha	105.000.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Proyek Investasi yang Diawasi		5 Persen	39.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Persen	250.000.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaporan LKPM		20 Persen	39.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Persen	250.000.000
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahandan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	umlah Penyelesaian Permasalahandan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Dengan Satuan: Kegiatan Usaha .)						10 Persen	10.000.000
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		100 Pelaku Usaha	35.700.000	PAJAK DAERAH		200 Pelaku usaha	210.000.000

						dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		60 Kegiatan Usaha	3.600.000	PAJAK DAERAH		60 kegiatan Usaha	30.000.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah		100 Persen	82.925.000			100%	90.000.000
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Data dan Informasi yang Terintegrasi		100 Persen	82.925.000			100%	90.000.000
2	18	06	2.01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		3000 Dokumen	82.925.000	PAJAK DAERAH		5500 Dokumen	90.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam pada perencanaan tahun ke 1 (satu) dalam Renstra Tahunn 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 32 subkegiatan berserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam table berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				19.552.361.377		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Batam	100%	18.085.988.377		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan, Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu		100%	10.400.000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20 Dokumen	5.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20 Laporan	5.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi		100%	14.261.827.677		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		826 Orang/Bulan	14.222.547.677	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	39.280.000	PAJAK DAERAH	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	100%	150.783.000		
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69 Paket	46.437.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	104.346.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD	100%	598.659.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.410.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	159.143.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	31.338.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	33.125.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	366.843.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	276.182.500		
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6 Unit	46.576.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	229.606.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	1.727.536.800		
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	1.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	102.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	125.236.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	1.060.609.400		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	44.240.000		

2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	240.190.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 Unit	230.045.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	546.134.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin investasi yang ditindaklanjuti	100%	184.360.000		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh insentif	50%	12.960.000		
2	18	02	2.01	01	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Dokumen	12.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	75%	171.400.000		
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	171.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kepedulian investasi	1%	943.051.000		

2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan		100%	943.051.000		
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		3 Dokumen	564.890.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		1 Dokumen	378.160.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP		100%	165.212.000		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat ketepatan waktu responsive berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan		97%	165.212.000		
2	18	04	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		1 Dokumen	4.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		5000 Pelaku Usaha	23.923.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan Pengelola Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	5000 Pelaku usaha	125.339.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	04	2.01	07	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	120 Kegiatan Usaha	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	100%	83.740.000		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	20%	83.740.000		
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100 Pelaku Usaha	61.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	22.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime		100%	90.000.000		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan		100%	90.000.000		
2	18	06	2.01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan		5000 Data	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

5.1 Catatan Penting

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arahan kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 6 program, 13 kegiatan dan 32 subkegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunann daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RKPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di Renja tahun 2026;
2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari arsip;
3. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPSTSP Kota Batam dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

4. Mengikuti bimbingan teknis mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh BKPM;

WALI KOTA BATAM

AMSAKIE ACHMAD